

**PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA**

Disertasi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan Disertasi guna memperoleh
gelar Doktor Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:
Dindin Syarief Nurwahyudin
NIM. 2387020001

**PROGRAM DOKTOR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**

**PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA**

Disertasi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan Disertasi guna memperoleh
gelar Doktor Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:
Dindin Syarief Nurwahyudin
NIM. 2387020001

**PROGRAM DOKTOR STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**

BERITA ACARA SIDANG UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini Senin, 10 November 2025 telah diselenggarakan Sidang Terbuka Promosi Doktor Gelombang ke-16 sebagai berikut :

Nama : DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 2387020001
Jenjang : Doktor (S3)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Disertasi : PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Setelah memperhatikan hasil ujian Promovendus berupa :

1. Hasil ujian semester selama studi program doktor dengan Indeks Prestasi 3.95 (Tiga Koma Sembilan Lima).
2. Nilai sidang ujian promosi Doktor 95.71 (Sembilan Puluh Lima Koma Tujuh Satu), Maka Tim Penguji menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.97 (Tiga Koma Sembilan Tujuh) Predikat yudisium Dengan Pujian.

Dengan hasil yang telah ditetapkan diberikan gelar Doktor bidang Hukum Keluarga Islam dengan segala hak, kehormatan dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Saudara sebagai Doktor ke - 87 pada Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan berkewajiban :

- a. Memperbaiki kesalahan dan memasukkan data tambahan dari para penguji;
- b. Memformat ulang Disertasi dalam bentuk buku ber-ISBN, menerbitkan pada Jurnal Ilmiah terakreditasi yang dapat diakses secara *online* dan mengunggah ke *website* Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- c. Pencabutan gelar Doktor dikenakan apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiaris;
- d. Menyerahkan Buku ber-ISBN ke Para Promotor, Penguji dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon selambat-lambatnya tiga bulan setelah sidang dilaksanakan.
- e. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, saudara dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Ilman Nafia, M.Ag
(Ketua Sidang)
2. Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag
(Sekretaris Sidang)
3. Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
(Promotor Utama)
4. Prof. Dr. Hajam, M.Ag
(Promotor Pendamping 1)
5. Prof. Dr. H. Sugianto, SH., M.H
(Promotor Pendamping 2)
6. Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag
(Penguji 1)
7. Dr. H. Didi Sukardi, MH
(Penguji 2)
8. Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M
(Oponen Ahli 1)
9. Prof. Dr. Adang Kuswaya, MA
(Oponen Ahli 2)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dindin Syarief Nurwahyudin
NIM : 2387020001
Jenjang Program : Doktor
Program Studi : HKI

Pada Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis/disertasi ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 14 April 2025

Yang menyatakan



Dindin Syarief Nurwahyudin
NIM 2387020001

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hal : *Penyerahan Disertasi*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa disertasi saudara Dindin Syarief Nurwahyudin yang berjudul:
"REKONSTRUKSI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEBENDAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA"
telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Seminar Hasil disertasi Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 April 2025

Promotor Utama


Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
NIP. 195903211983031002

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar
Hal : *Penyerahan Disertasi*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa disertasi saudara Dindin Syarief Nurwahyudin yang berjudul:
"REKONSTRUKSI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEBENDAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA"
telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Seminar Hasil disertasi Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 April 2025

Ko-Promotor 1



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

Prof. Dr. H. Sugianto, M.H
Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar.
Hal : *Penyerahan Disertasi*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa disertasi saudara Dindin Syarief Nurwahyudin yang berjudul:
"REKONSTRUKSI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEBENDAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA"
telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang Seminar Hasil disertasi Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 April 2025

Promotor Utama



Prof. Dr. H. Sugianto, M.H
NIP. 196702082005011002

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan harta dan validitas perjanjian perkawinan. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan, UUPA, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum Islam menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dalam mengatur status harta bersama maupun pemisahan harta. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ditinjau dari hukum nasional dan hukum Islam, serta bagaimana merumuskan model rekonstruksi yuridis yang lebih ideal dan aplikatif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan studi empiris melalui analisis putusan pengadilan, wawancara terbatas dengan praktisi hukum, dan penelusuran kasus-kasus sengketa harta dalam perkawinan campuran. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta analisis sosial-hukum menggunakan teori living law dan maqāṣid al-syarī'ah. Data empiris diolah dengan teknik reduksi, kategorisasi, dan verifikasi model Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni regulasi yang signifikan antara hukum positif dan hukum Islam terkait pengaturan harta dalam perkawinan campuran, terutama dalam aspek kepemilikan tanah, validitas perjanjian, dan perlindungan hak pasangan WNI. Perjanjian perkawinan dalam praktik sering tidak efektif karena hambatan administratif, rendahnya pemahaman aparat, serta anggapan negatif masyarakat. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi yuridis integratif yang memadukan prinsip perlindungan harta dalam hukum nasional, nilai keadilan dan kesalingan dalam hukum Islam, serta kebutuhan praktis pasangan perkawinan campuran.

Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan model rekonstruksi yuridis integratif yang menyelaraskan hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks perjanjian perkawinan campuran serta menawarkan kerangka sinkronisasi regulasi yang belum diuraikan dalam penelitian sebelumnya. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memberikan dasar konseptual dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum dalam memperkuat perlindungan hak kebendaan pasangan perkawinan campuran di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Kebendaan, Hukum Keluarga Islam, Rekonstruksi Yuridis

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) continue to increase each year, generating complex legal consequences, particularly concerning property ownership and the validity of prenuptial agreements. The disharmony among the Marriage Law, the Basic Agrarian Law (UUPA), Constitutional Court decisions, and Islamic law creates legal uncertainty for couples in determining the status of joint property as well as the separation of assets. The main problems examined in this study include the juridical implications of prenuptial agreements in mixed marriages from the perspectives of national law and Islamic law, and the formulation of an ideal and applicable model of juridical reconstruction.

This research employs a normative juridical method supported by empirical inquiry through the analysis of court decisions, limited interviews with legal practitioners, and the examination of property-related disputes in mixed marriages. The analysis integrates statutory, case, and conceptual approaches, combined with socio-legal perspectives using the theories of living law and *maqāṣid al-sharī'ah*. Empirical data were processed using the Miles & Huberman model of reduction, categorization, and verification.

The findings reveal significant regulatory disharmony between positive law and Islamic law in governing property within mixed marriages, particularly in relation to land ownership, the validity of prenuptial agreements, and the legal protection of Indonesian spouses. In practice, prenuptial agreements often lack effectiveness due to administrative barriers, limited understanding among authorities, and negative societal perceptions. This study proposes an integrative juridical reconstruction model that harmonizes principles of asset protection within national law, values of justice and reciprocity in Islamic law, and the practical needs of couples in mixed marriages.

The novelty of this research lies in its development of an integrative juridical reconstruction model that aligns national law with Islamic law in the context of mixed-marriage prenuptial agreements, while providing a regulatory synchronization framework absent in previous studies. The scientific contribution of this dissertation is to offer conceptual foundations and practical recommendations for policymakers, judges, and legal practitioners to strengthen the protection of property rights for couples in mixed marriages in Indonesia.

Keywords: Prenuptial Agreement, Mixed Marriage, Property Rights, Islamic Family Law, Juridical Reconstruction

المخلص

عامًا بعد عام، مما (WNA) والأجانب (WNI) تزداد حالات الزواج المختلط بين المواطنين الإندونيسيين يخلق آثارًا قانونية معقدة، ولا سيما ما يتعلق بملكية الأموال وصحة اتفاقيات ما قبل الزواج. إن عدم الانسجام وقرارات المحكمة الدستورية، وأحكام الشريعة (UUPA) بين قانون الزواج، وقانون الأساس الزراعي الإسلامية يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني لدى الأزواج في تحديد وضعية الأموال المشتركة وكذلك فصل الذمة المالية. وتتمثل المشكلات الرئيسية التي تبحثها هذه الدراسة في الآثار القانونية لاتفاقية ما قبل الزواج في حالات الزواج المختلط من منظور القانون الوطني والقانون الإسلامي، إضافة إلى صياغة نموذج مثالي وقابل للتطبيق لإعادة البناء القانوني.

من خلال تحليل الأحكام Empirical تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني النظري المدعوم بمقاربة القضائية، وإجراء مقابلات محدودة مع الممارسين القانونيين، والوقوف على النزاعات المتعلقة بالأموال في الزواج المختلط. وتدمج الدراسة بين مناهج التحليل التشريعي والقضائي والمفاهيمي، إلى جانب المقاربة الاجتماعية-القانونية المستندة إلى نظريتي "القانون الحي" و"مقاصد الشريعة". وقد تمت معالجة البيانات التجريبية وفق نموذج "مايلز وهوبرمان" في الاختزال والتصنيف والتحقق.

تكشف نتائج الدراسة وجود تعارض تنظيمي ملحوظ بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في تنظيم الملكية داخل الزواج المختلط، ولا سيما فيما يتعلق بملكية الأراضي، وصحة اتفاقيات ما قبل الزواج، وحماية الحقوق القانونية للطرف الإندونيسي. وفي التطبيق العملي، كثيرًا ما تفتقر اتفاقيات ما قبل الزواج إلى الفاعلية بسبب العوائق الإدارية، وضعف فهم بعض الجهات المختصة، والاتجاهات الاجتماعية السلبية. وتقتصر هذه الدراسة نموذجًا تكامليًا لإعادة البناء القانوني يُوائم بين مبادئ حماية الأموال في القانون الوطني، وقيم العدل والمساواة في الشريعة الإسلامية، واحتياجات الأزواج العملية في الزواج المختلط.

وتكمن جدة هذه الدراسة في تطوير نموذج تكاملي لإعادة البناء القانوني ينسجم فيه القانون الوطني مع الشريعة الإسلامية في سياق اتفاقيات ما قبل الزواج داخل الزواج المختلط، مع تقديم إطار للموازنة التنظيمية غير مسبوق في الدراسات السابقة. وتتمثل الإضافة العلمية لهذه الأطروحة في تقديم أساس نظري وتوصيات عملية لصانعي السياسات والقضاة والممارسين القانونيين لتعزيز حماية الحقوق المالية للأزواج في الزواج المختلط في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: اتفاق ما قبل الزواج، الزواج المختلط، حقوق الملكية، قانون الأسرة الإسلامية، إعادة البناء القانوني

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul *“PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA”*. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini lahir dari keprihatinan terhadap disharmoni norma antara hukum positif dan hukum Islam terkait perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan campuran, serta implikasi yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik dalam proses studi dan penyusunan disertasi ini.
2. Direktur Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Ilman Nafi’a, M. Ag., atas bimbingan, motivasi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyelesaian studi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag., atas koordinasi dan peran aktif dalam mendukung keberhasilan studi penulis.
4. Promotor utama Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag., Ko-promotor 1 Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag., dan Ko-promotor 2 Prof. Dr. H. Sugianto, M.H, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing dan memberikan masukan berharga dalam proses penulisan dan penyempurnaan disertasi ini.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang luar biasa selama masa studi.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala doa, dukungan, dan semangat yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Cirebon, 14 April 2025

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
الملخص.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis.....	7
1. Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo.....	7
2. Teori Living Law Eugen Ehrlich: Fondasi bagi Pemikiran Hukum Progresif	17
3. Teori Ushul Fiqh.....	24
4. Teori Maqashid Syari'ah.....	30
F. Metodologi Penelitian.....	48
1. Sumber Data.....	50
2. Metode Pengumpulan Data.....	50
3. Metode Analisis Data.....	50
4. Sistematika Pembahasan.....	53
G. Tinjauan Pustaka.....	56
1. Pengertian Perkawinan.....	56
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	65
3. Tujuan Perkawinan.....	71
4. Pengertian Perjanjian pada Umumnya.....	74
5. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	77
6. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan.....	85
7. Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	90
8. Sebab Terjadinya Perjanjian Perkawinan.....	93
9. Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	95
10. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia: Kedudukan, Konsekuensi,	dan Tujuan.....
97	
11. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.....	106

12. Analisis Putusan Pengadilan.....	112
13. Penelitian Terdahulu.....	138
BAB II KONDISI EKSISTING PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA.....	145
A. Sejarah Perjanjian Perkawinan Campuran di Indonesia.....	145
B. Sejarah Perjanjian Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam.....	157
C. Perjanjian Perkawinan Campuran di Indonesia: Landasan Yuridis dan Implikasi Hukumnya.....	162
D. Ketentuan tentang Hak Kebendaan dalam Perkawinan Campuran.....	168
E. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional: Implikasi terhadap Kepemilikan Harta.....	170
F. Permasalahan yang Ditemui dalam Praktik: Studi Empirik Kendala Hukum dalam Perkawinan Campuran.....	178
BAB III ANALISIS KESENJANGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN.....	184
A. Ketidaksesuaian antara Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Pengaturan Hak Kebendaan.....	184
B. Ketidaksesuaian antara Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Pengaturan Hak Kebendaan.....	185
C. Tumpang Tindih atau Kekosongan Hukum dalam Hak Kebendaan Perkawinan Campuran.....	202
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN.....	210
A. Usulan Perubahan Regulasi dalam Perjanjian Perkawinan Campuran.....	210
B. Model Perjanjian Perkawinan yang Ideal.....	212
C. Rekonstruksi Yuridis Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Progresif dan Keadilan Gender.....	214
D. Dampak terhadap Kepastian Hukum.....	217
E. Dampak terhadap Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI).....	221
F. Konsekuensi terhadap Implementasi Hukum Keluarga Islam.....	225
G. Novelti Hasil Penelitian.....	231
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	241
A. Kesimpulan.....	241
B. Rekomendasi.....	242
DAFTAR PUSTAKA.....	244
LAMPIRAN.....	256